

# Memahami Jatidiri UPI, 1954-2004: Perspektif Sejarah

Oleh: Andi Suwirta

## Pengantar <sup>1</sup>

Mencermati tulisan Iik Nurulpaik, “Andai Saya Rektor Universitas Pendidikan Indonesia” (*PR*, 13/10/2004) dan Johar Permana, “Mempertanyakan Kembali Jati Diri UPI” (*PR*, 20/10/2004) menarik karena dua hal. *Pertama*, kedua penulis tersebut – sebagai bagian dari civitas akademika UPI – ingin memberikan “kado ulang tahun” bagi lembaganya dalam memasuki usia setengah abad. *Kedua*, berbeda dengan makna sebuah “kado ulang tahun” yang umumnya menggembirakan, kedua penulis tersebut memberikan perspektif dan analisa terhadap lembaganya dengan kesan “miring” dan kurang menggembirakan. Bahwa tulisan dengan nada seperti itu bermaksud untuk memacu pimpinan UPI agar lebih keras lagi berpikir dan bekerja demi kemajuan UPI ke depan, barangkali benar. Namun satu hal yang terlupakan adalah bahwa tulisan itu kurang memahami sejarah lembaga UPI dan *discourse* pemikiran para pimpinannya dari dahulu sampai sekarang.

Tulisan ini ingin memberikan perspektif lain, dengan mencoba menelusuri kembali signifikansi sejarah lembaga di satu sisi, dan di sisi lain konsistensi pemikiran pendidikan dari para pimpinan UPI dari tahun 1954, sejak lembaga itu didirikan, sampai sekarang tahun 2004, ketika lembaga ini memasuki usianya yang ke-50 tahun. Dengan perspektif seperti itu diharapkan para civitas akademika khususnya dan masyarakat umumnya memahami dengan baik keberadaan dan peran UPI sebagai lembaga perguruan tinggi yang memiliki visi

---

<sup>1</sup>Tulisan ini pernah dikirim ke surat kabar *Pikiran Rakyat* di Bandung, tapi tidak dimuat dan tidak pula dikembalikan oleh pihak Redaksi tanpa alasan yang jelas.

dan misi untuk meningkatkan kualitas dan martabat bangsa Indonesia melalui pendidikan.

### **Signifikansi Sejarah Lembaga**

Untuk apa sebuah perguruan tinggi didirikan? Demikian pertanyaan provokatif dari seorang ahli pendidik, yang maksudnya adalah hanya untuk sekedar mengingatkan kita betapa penting untuk setiap lembaga itu – termasuk perguruan tinggi – mengenali kembali visi, misi, dan cita-citanya semula agar tetap konsisten dan kontekstual dengan tantangan zaman (Drost, 1987). Jika setiap lembaga itu lahir karena produk dan jiwa zamannya, lantas bagaimana halnya dengan sebuah perguruan tinggi, seperti UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) yang lahir pada tahun 1950-an, saat bangsa ini baru saja memenangkan revolusi kemerdekaannya secara terhormat dan membanggakan? Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang bersifat reflektif dan kritis semacam itu kiranya kita perlu mencermati dan menengok kembali – untuk kepentingan melangkah dengan pasti ke depan – perjalanan sejarah lembaga ini selama 50 tahun, 1954–2004.

Untuk bisa memahami perjalanan UPI, maka kajian terhadap sejarah lembaga ini menjadi sangat penting dan mendesak. Sejarah lembaga adalah sejarah struktur dalam sebuah sistem sosial. Ia termasuk kajian sejarah yang bersifat konjungtur, karena dinamika perubahannya yang memerlukan waktu berjangka panjang (Sjamsuddin, 1996). Kurun waktu 50 tahun atau setengah abad adalah cukup bagi sebuah lembaga untuk menunjukkan dinamika dan perubahannya. Sementara itu, lembaga adalah entitas sosial yang hidup manakala ia dipimpin oleh individu atau kelompok sosial yang aktif, kreatif, dan inovatif dalam menjabarkan visi dan misi lembaganya agar menjadi kenyataan. Terhadap individu dan kelompok sosial yang kreatif ini, maka kajian terhadap pemikiran dan sosok pimpinan lembaga menjadi tak terelakkan.

Dalam konteks sejarah lembaga UPI, maka pemikiran pendidikan dan sosok pimpinan dari Mas Sadarjoen Siswomartojo (Dekan pertama PTPG tahun 1954-1957 dan Ketua pertama FKIP-UNPAD Bandung tahun 1957-1961) sampai dengan Mohammad Fakry Gaffar (Rektor terakhir IKIP

Bandung tahun 1995-1999 dan Rektor pertama UPI tahun 1999-2004) menjadi penting untuk dikenali kembali oleh sivitas akademiknya. Dalam hal ini tidak terkecuali dengan tokoh yang dipandang sebagai *the founding father* UPI, yakni Muhammad Yamin, yang pada saat lembaga ini didirikan ia tidak hanya menjabat sebagai Menteri PP dan K (Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan) tetapi juga sebagai Ketua Jurusan Sejarah Budaya di PTPG dan FKIP-UNPAD Bandung tahun 1954-1962.

Tentang para pimpinan UPI sendiri, sebagaimana diketahui, bahwa selama 50 tahun lembaga ini berdiri telah dipimpin oleh tidak lebih dari 9 orang tokoh yang dinilai terpercaya dan unggul pada zamannya. Mereka adalah *primus inter pares*, putra-putra terbaik yang terpilih dan ditakdirkan untuk membawa lembaga ini menuju visi, misi, dan cita-cita pendidikan yang didambakan (Sjamsuddin & Zulkabir eds., 2004). Mereka yang terpilih, unggul, dan terpercaya pada zamannya itu adalah: (1) Mas Sadarjoen Siswomartojo, (2) Mas Achmad Gazali Soerianatasoedjana, (3) Harsojo, (4) Roeslan Abdulgani, (5) Achmad Sanusi, (6) Garnadi Prawirosudirdjo, (7) Muhammad Numan Somantri, (8) Mas Abdul Kodir, dan (9) Mohammad Fakry Gaffar.

Tentang pemikiran pendidikan para pimpinan lembaga ini nampaknya tidak semuanya terpotret dengan baik. Sistem pengarsipan dan dokumentasi yang profesional di masa-masa yang akan datang nampaknya perlu segera dipikirkan dan dilaksanakan. Dalam konteks ini maka pemikiran yang berharga dari Mas Achmad Gazali Soerianatasoedjana, misalnya, sampai sekarang masih belum bisa diketemukan dan saya mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Kemudian, *discourse* pemikiran mereka yang akan dikaji dan dianalisis dalam tulisan ini ini juga sifatnya hanya “percikan fenomena”, artinya bahwa ia lebih merupakan secercah cahaya pemikiran dari sekian banyak cahaya pemikiran yang dimiliki oleh tokoh-tokoh tersebut dalam kehidupannya. Masih banyak pemikiran lain dari tokoh-tokoh pimpinan UPI ini yang perlu dikenali dan diapresiasi oleh sivitas akademiknya khususnya dan masyarakat umumnya. Untuk kepentingan tulisan ini saya akan

memilih pemikiran mereka berdasarkan kriteria, di antaranya bahwa pemikiran tersebut haruslah yang ditulis pada zamannya; atau minimal pemikiran tersebut berkenaan dengan kiprah, pengalaman, dan kebijakan tokoh tersebut pada saat memimpin lembaganya.

Sebagai sebuah lembaga, UPI adalah sistem sosial yang ditopang oleh sub-sub sistem di dalamnya. Tiap-tiap sub sistem tersebut juga memiliki dinamika dan perkembangannya yang khas dan unik. Karena itu, ke depan perlu juga digalakkan usaha untuk memotret dan mengenali kembali proses genesis dan dinamika perkembangan sub sistem tersebut, seperti sejarah Fakultas, Lembaga, Balai, Jurusan, dan Program Studi yang ada di lingkungan UPI. Memang, di usia emas UPI yang ke-50 tahun ini pertanyaan mendasar seperti “untuk apa sebuah lembaga didirikan” menjadi relevan untuk diajukan, dan menjadi penting pula untuk dicarikan jawabannya secara komprehensif dan memuaskan.

### **Konsistensi Pemikiran Pendidikan para Pimpinan UPI**

UPI didirikan pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 1954. Pada saat didirikan, namanya adalah PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru) Bandung. Berdirinya PTPG merupakan pemikiran dan kebijakan dari Menteri PP dan K yang pada waktu itu dijabat oleh Prof.Mr.H. Muhammad Yamin. Selain PTPG Bandung, oleh Menteri PP dan K diresmikan juga tiga PTPG di tempat lain di Indonesia, yaitu: Batusangkar (Sumatera Barat), Malang (Jawa Timur), dan Tondano (Sulawesi). Khusus mengenai PTPG Bandung, peresmian berdirinya dilakukan langsung oleh Menteri PP dan K yang ditandai oleh penanaman pohon beringin dan sebuah prasasti dari PM (Perdana Menteri) Mr. Ali Sastroamidjojo. Tentang pendirian PTPG Bandung ini Prof.Mr.H. Muhammad Yamin (1954) menyatakan, antara lain, bahwa sudah saatnya bagi bangsa Indonesia untuk memikirkan dan melaksanakan pendidikan guru tingkat universitas. Di lembaga ini nantinya akan digembleng dan dipersiapkan “benih-benih generasi

muda” dari seluruh pelosok tanah air Indonesia yang akan membangun dan mencerdaskan bangsa di masa depan.

Prof.Mr.H. Muhammad Yamin memang tidak lama menjabat sebagai Menteri PP dan K pada masa pemerintahan PM Ali Sastroamidjojo (1953-1955). Sistem politik parlementer dengan demokrasi liberalnya menjadikan pemerintahan datang dan pergi silih berganti (Feith, 1962). Namun upaya untuk membangun pendidikan tinggi di Indonesia memang baru dimulai pada tahun 1950-an. PTPG Bandung, bersama-sama dengan perguruan tinggi lainnya di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1950-an dengan demikian merupakan lembaga yang sarat dengan visi dan misi untuk mencerdaskan bangsa agar maju dan berkembang, sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Prof.Mr.H. Muhammad Yamin sendiri, betatapun sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri PP dan K, masih tetap menjabat sebagai Ketua Jurusan Sejarah Budaya PTPG Bandung sampai dengan beliau meninggal dunia pada tahun 1962 (Zainul & Saripudin, 2004). Sampai sekarang, oleh sivitas akademika UPI, Prof.Mr.H. Muhammad Yamin dipandang sebagai salah seorang *the founding father* lembaga ini.

Sementara itu Dekan PTPG Bandung, Prof.Dr. [*Honoris Causa*] Mas Sadarjoen Siswomartojo menandaskan bahwa PTPG mempunyai fungsi untuk “*memberi penjegaran dan daja hidup baru pada alam sekitarnja untuk ikut serta melangsungkan dan memperkembangkan hidupnja kebudajaan*” (*Pikiran Rakjat*, 21/10/1954). Pernyataan ini mengandung makna yang luas dan menjadi tantangan PTPG pada masa-masa awal berdirinya di tengah-tengah masyarakat. Agar lembaga ini bisa eksis dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka seyogianya seluruh sivitas akademika PTPG menyadari tugas berat yang akan dihadapi ke depan. Karena itu Prof.Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo berpesan agar para dosen, mahasiswa, dan karyawan PTPG memiliki integritas pribadi dan akademik yang baik, “*di atas alas jang kokoh, jaitu dasar2 filosofis-didaktis, psikologis-metodis sesuai dengan fungsi sosial-pedagogis dari seorang guru*” (*Pikiran Rakjat*, 21/10/1954).

Ketika pertama kali didirikan pada tahun 1954, jumlah mahasiswa PTPG Bandung sebanyak 215 orang, yang tersebar di lima Jurusan masing-masing: (1) Jurusan Ilmu Pendidikan dan Pendidikan Jasmani; (2) Jurusan Bahasa dan Kesusastraan Indonesia dan Inggris; (3) Jurusan Sejarah Budaya; (4) Jurusan Ilmu Pasti Alam; dan (5) Jurusan Ekonomi dan Hukum Negara. Setelah PTPG berubah menjadi FKIP-UNPAD pada tahun 1957, jumlah mahasiswa bertambah menjadi 1.308 orang dengan jumlah Dosen sebanyak 146 orang (Sjamsuddin & Zulkabir eds., 2004). Gedung Partere “Bumi Siliwangi”, bekas villa Isola yang dibangun pada tahun 1933, tetap menjadi pusat kegiatan pembelajaran dan pendidikan yang utama (Lombard, 1997).

Pada waktu PTPG berubah menjadi FKIP-UNPAD tahun 1957, lembaga ini pernah mendapat kunjungan kehormatan dari Presiden Soekarno. Kunjungan ini diisi oleh kegiatan kuliah umum (*stadium general*) dari Presiden Soekarno. Sivitas akademika PTPG dan FKIP-UNPAD Bandung, terutama para mahasiswanya, juga boleh berbangga diri karena Wakil Presiden Mohamad Hatta termasuk tokoh yang sering memberikan kuliah umum pada akhir tahun 1950-an. Hal itu membuktikan bahwa lembaga ini sejak awal didirikannya memang “bersifat nasional”, tidak hanya karena para mahasiswanya yang datang dari berbagai pelosok tanah air Indonesia, tetapi juga karena lembaga ini dipimpin oleh tokoh-tokoh dengan reputasi, visi, dan kualitas pemikiran yang menasional.

Tentang perubahan PTPG menjadi FKIP memang tidak semua anggota sivitas akademika menyetujuinya. Prof.Mr.H. Muhammad Yamin, misalnya, termasuk salah seorang yang keberatan dengan alasan adanya kekhawatiran bahwa otonomi kelembagaan PTPG akan tereduksi setelah menjadi FKIP (Wawancara dengan Asmawi Zainul, 20/10/2003). Namun setelah ada jaminan dari pimpinan UNPAD – yang tidak lain adalah teman seperjuangan Prof.Mr.H. Muhammad Yamin sendiri sejak zaman pergerakan nasional dan zaman revolusi Indonesia, yaitu Prof.Mr. Iwa Kusumasumantri – tentang kebebasan dan otonomi lembaga, maka PTPG resmi menjadi bagian dari FKIP-UNPAD pada tahun 1957 (Lubis, 2003). Dan

Prof.Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo tercatat sebagai Ketua pertama FKIP-UNPAD Bandung, tahun 1957-1961.

Dalam perkembangan selanjutnya FKIP-UNPAD berubah menjadi FKIP A (Sosial dan Budaya) dan FKIP B (Pasti Alam dan Teknik). Dan setelah Prof.Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo tidak lagi menjabat sebaga Ketua FKIP-UNPAD pada tahun 1961, maka kedudukannya kemudian digantikan oleh Prof. Mas Achmad Gazali Soerianatasoedjana, M.A. (1961-1962) dan Prof.Drs. Harsojo (1962-1963). Periode ini boleh dikatakan merupakan masa-masa yang penuh dengan “dualisme” sebagai imbas dari kehidupan politik nasional. Kementerian PP dan K dipecah menjadi dua, sehingga ada Menteri PDM (Pendidikan Dasar dan Menengah) dan Menteri PTIP (Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan). Sementara FKIP masuk dalam orotitas Kementerian PTIP, maka Kementerian PDM berusaha untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi keguruan seperti IPG (Institut Pendidikan Guru), di samping terus menyelenggarakan Kursus-kursus B.I. dan B.II. untuk guru-guru pendidikan dasar dan menengah (Rifa'i, 1966).

Dalam kapasitasnya sebagai Dekan FKIP, Prof.Drs. Harsojo tetap konsisten pada pemikiran bahwa tugas perguruan tinggi pada masyarakat yang sedang membangun adalah penting agar ia menjadi *agent of change* dan *agent of problem solver* dari setiap permasalahan dan hambatan sosial. Sebagai seorang antropolog, Prof.Drs. Harsojo menekankan apa makna edukasi, universitas, dan kelompok cendekiawan dalam memainkan peranannya untuk membangun Indonesia dari masyarakat yang bercorak tradisional menuju masyarakat yang modern. Masyarakat modern adalah sebuah entitas sosial yang maju dan berkembang karena didorong oleh prinsip-prinsip sosial yang berdasarkan pada prestasi, profesi, disiplin, kerja keras, menghargai waktu, dan punya visi progresif ke depan.

Merebaknya fenomena “dualisme” dalam dunia pendidikan dirasakan betul oleh sivitas akademika FKIP, dalam hal ini terutama oleh para mahasiswanya. Dalam usahanya tidak kenal lelah, para mahasiswa FKIP pada tahun 1960-an terus mendesak kepada pemerintah, termasuk kepada Presiden Soekarno, untuk segera mengakhiri dualisme yang terjadi pada

tingkat pendidikan tinggi di Indonesia. Ternyata gerakan mahasiswa FKIP itu mendapat respons dari Presiden Soekarno. Pada tahun 1963, para mahasiswa FKIP berhasil meyakinkan Presiden Soekarno untuk menugaskan Prof.Dr.H. Roeslan Abdulgani – tokoh nasional dan salah seorang kepercayaan Presiden pada awal tahun 1960-an – agar mengatasi masalah dualisme dalam dunia pendidikan di Indonesia. Maka pada tahun 1963 itu lahirlah IKIP Bandung, yang merupakan fusi dari FKIP dan IPG, dengan Prof.Dr.H. Roeslan Abdulgani sebagai Rektornya yang pertama. Dengan didirikannya IKIP Bandung ini, demikian Prof.Dr.H. Roelan Abdulgani, maka tidak ada lagi dualisme di bidang ilmu pendidikan dan keguruan.

Masalah dualisme di bidang pendidikan untuk sementara waktu memang dapat diredam. Namun muncul masalah lain yang juga merupakan imbas dari dinamika politik nasional, yaitu menjadikan semua lembaga yang ada di Indonesia, termasuk perguruan tinggi, untuk mengikuti arus Manipol USDEK (Manifesto Politik tentang Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, serta Kepribadian Nasional) yang berporoskan NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Kebijakan politik yang tidak bisa ditolak ini datangnya dari pemerintah dan Presiden Soekarno, di mana Prof.Dr.H. Roeslan Abdulgani sendiri harus memainkan peranannya sebagai Jubir USMAN (Juru Bicara USDEK Manipol).

Suasana kehidupan perguruan tinggi yang penuh dengan dinamika, persaingan, dan konflik politik pada zaman Manipol USDEK dan NASAKOM ini jelas berimplikasi pada sivitas akademiknya. Dinamika itu juga dirasakan di IKIP Bandung, yang menyebabkan Dosen, mahasiswa, dan karyawannya terpolarisasi di antara kutub-kutub politik dan orientasi pemikiran ideologi yang saling bertentangan. Bagi mereka yang berpandangan “nasionalis”, “agama”, atau “komunis”, tersedia organisasi-organisasi keserjanaan dan mahasiswa dengan orientasi ideologi-politik yang berbeda-beda itu. Di kalangan mahasiswa IKIP Bandung, misalnya, organisasi yang bercorak nasionalis seperti GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional

Indonesia) dan GERMINDO (Gerakan Mahasiswa Indonesia); organisasi yang bercorak Islam seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah); serta organisasi yang berfaham komunis dan sosialis seperti CGMI (Central Gerakan Mahasiswa Indonesia) dan GEMSOS (Gerakan Mahasiswa Sosialis) tumbuh dengan suburnya. Dalam derajat yang signifikan hal tersebut menjadikan suasana kehidupan akademik di IKIP Bandung nyaris terganggu dan berantakan.

Kehidupan politik yang sarat dengan pertentangan dan konflik politik itu harus berakhir dengan meletusnya peristiwa G-30-S (Gerakan 30 September) tahun 1965. Peristiwa G-30-S adalah fenomena yang sangat berdarah dan tragis dalam sejarah Indonesia modern, yang merupakan awal dari runtuhnya kekuasaan Presiden Soekarno dengan para pendukungnya, dan juga hancurnya kekuatan komunisme di Indonesia. Namun dalam waktu yang bersamaan mulai muncul pula kekuatan militer, dalam hal ini TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat), di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Inilah akhir dari sejarah pudarnya pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, dan awal bersinarnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto.

Perubahan rejim membawa implikasi juga bagi perubahan konfigurasi sosial dan politiknya. Dunia pendidikan umumnya, dan perguruan tinggi khususnya, yang tidak pernah kedap dari pengaruh kehidupan politik suatu negara-bangsa juga merasakan *mainstream* perubahan itu. Para mahasiswa IKIP Bandung yang anti komunis mulai bergerak, bersama-sama dengan kekuatan masyarakat lainnya, untuk membentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan menuntut adanya perubahan pemerintahan. Dalam hal ini menarik juga pengakuan Prof.Dr.H. Achmad Sanusi, S.H.,M.PA. bahwa pengangkatan dirinya sebagai Rektor IKIP Bandung, menggantikan Prof.Dr.H. Roeslan Abdulgani (1963-1966), salah satu tugas utamanya adalah untuk “memenangkan Orde Baru”. Konsekuensi dari peralihan rejim yang penuh gejolak ini – sebagaimana halnya sebuah revolusi – acapkali membawa

korban dan memakan anak-anaknya sendiri. Dalam konteks ini banyak Dosen, mahasiswa, dan karyawan IKIP Bandung yang dinilai terlibat dan terindikasikan secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa G-30-S/PKI tahun 1965 kemudian diberhentikan, disuruh pindah kerja, atau menghilang tidak diketahui rimbanya.

Tugas memenangkan Orde Baru dan membersihkan kampus dari anasir-anasir nasionalis “kiri” adalah satu hal, tetapi hal yang juga tidak boleh dilupakan adalah membenahi masalah-masalah akademik di IKIP Bandung yang nyaris terbenakalai. Di sinilah pemikiran dan kebijakan Prof.Dr.H. Achmad Sanusi, S.H.,M.PA. relevan untuk dikemukakan, di antaranya adalah: (1) mengintegrasikan IKIP Bandung dengan IKIP-IKIP Karyawan, dan membuka cabang-cabang IKIP di daerah yang dibina oleh IKIP Bandung seperti di Aceh, Palembang, dan Pontianak; (2) membuka Program Pendidikan Post-Doktoral untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di IKIP Bandung khususnya dan lembaga pendidikan tinggi lain di Indonesia pada umumnya; (3) melakukan restrukturisasi Fakultas, Jurusan, Balai, dan Lembaga yang ada di IKIP Bandung agar “warna” akademisnya lebih mengemuka daripada yang lain; dan (4) mengembangkan kehidupan keagamaan melalui mesjid kampus, Al-Furqon, yang telah dirintis pendiriannya sejak zaman Prof.Dr. Mas Sadarjoen Siswomartoyo.

Prof.Dr.H. Achmad Sanusi, S.H.,M.PA. menjadi Rektor IKIP Bandung sampai dengan tahun 1971. Selanjutnya beliau digantikan oleh Prof.Dr. Garnadi Prawirosudirdjo, M.Sc., yang pernah menjabat sebagai PR (Pembantu Rektor) I Bidang Akademik. Mungkin dari sinilah awal sebuah tradisi itu dimulai, yakni bahwa Rektor IKIP Bandung biasanya adalah selalu dipegang oleh orang yang pernah menjabat PR I. Rasionalnya barangkali sederhana saja: perguruan tinggi bukanlah lembaga politik, melainkan lembaga akademik di mana tradisi berpikir ilmiah, kritis, kreatif, dan inovatif mestilah lebih dominan daripada yang lain. Prof.Dr. Garnadi Prawirosudirdjo, M.Sc. memang bukan figur seorang politisi, melainkan seorang akademisi dan pendidik. Citra diri dan

kepemimpinannya selama menjabat sebagai Rektor IKIP Bandung nampaknya cukup diterima juga oleh pemerintah Orde Baru. Hal itu dibuktikan dengan kunjungan Presiden Soeharto ke kampus Bumi Siliwangi IKIP Bandung pada tahun 1974, saat beberapa perguruan tinggi yang lain – terutama para mahasiswanya – baru saja melakukan tindakan oposisional dalam sebuah peristiwa yang terkenal dengan nama MALARI (Malapetaka 15 Januari) tahun 1974. Kunjungan Presiden Soeharto itu malah dilakukannya sekali lagi, kali ini bersama Ibu Tien Soeharto, untuk menghadiri acara Pramuka (Praja Muda Karana) Mahasiswa di IKIP Bandung pada tahun 1975.

Sadar akan tugasnya yang berat, dan juga berdasarkan pengalamannya selama tahun 1960-an, Prof.Dr. Garnadi Prawirosudirdjo, M.Sc. mengembangkan pemikiran perlunya sivitas akademika IKIP Bandung, dan juga masyarakat luas, memiliki sikap dan pandangan yang integral bahwa antara ilmu dan iman adalah merupakan dua hal yang tidak bisa saling menegasikan atau dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dengan begini maka fungsi-fungsi penelitian, pendidikan, dan pengabdian di perguruan tinggi harus terus digalakkan untuk mengembangkan tradisi berpikir sains dan sikap intelektual yang mandiri, namun dalam waktu yang bersamaan pembinaan keagamaan di kampus juga terus ditumbuhsurburkan agar diperoleh landasan etika dan moral dalam mengamalkan ilmu pengetahuan. Dalam bahasa yang populer, pemikiran dan kebijakan Prof.Dr. Garnadi Prawirosudirdjo, M.Sc. itu barangkali dapat dikatakan sebagai “ilmu yang amaliah dan amal yang ilmiah”.

Prof.Dr. Garnadi Prawirosudirdjo, M.Sc. mengakhiri masa jabatannya sebagai Rektor IKIP Bandung pada tahun 1978. Ia kemudian digantikan oleh Prof.Drs.H. Muhammad Numan Somantri, M.Sc., tokoh yang juga sebelumnya pernah menjabat sebagai PR I Bidang Akademik. Pengangkatan Prof.Drs.H. Muhammad Numan Somantri, M.Sc. sebagai Rektor IKIP Bandung adalah menarik karena dua hal. *Pertama*, beliau adalah mahasiswa PTPG angkatan pertama yang berhasil menyelesaikan sarjana muda dan sarjana pendidikannya pada tahun 1957 dan 1959. Untuk pertama kalinya, dengan demikian,

IKIP Bandung dipimpin oleh putera terbaik almamaternya sendiri. *Kedua*, masa jabatannya sebagai Rektor IKIP Bandung yang cukup lama (1978-1982 dan 1982-1987) menunjukkan kepercayaan pemerintah dan kemampuannya memimpin lembaga ini menuju ke arah kemajuan. Memang, Prof.Drs.H. Muhammad Numan Somantri, M.Sc. termasuk salah seorang pimpinan perguruan tinggi yang cukup berhasil mensosialisasikan dan menerapkan kebijakan Menteri P dan K tentang NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) dan Wawasan Almamater yang umumnya membuat “gerah” kehidupan mahasiswa, tanpa mendapatkan reaksi dan gejolak yang berarti di kampus IKIP Bandung.

Dalam pandangan dan pemikiran Prof.Drs.H. Muhammad Numan Somantri, M.Sc. civitas akademika IKIP Bandung, terutama para mahasiswanya, mestilah memiliki kemampuan berpikir yang jelas tentang struktur disiplin ilmu yang digelutinya. Karena itu obsesinya tentang perlunya “disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu” merupakan *discourse* dan *icon* pemikirannya yang terkenal dari dahulu sampai sekarang. Namun tidak hanya itu, Prof.Drs.H. Muhammad Numan Somantri, M.Sc. juga dikenal oleh sivitas akademika IKIP Bandung karena gagasan tentang perlunya kehidupan kampus yang “ilmiah, edukatif, dan religius”. Kehidupan kampus yang religius ditunjukkan oleh kebijakannya untuk terus mengembangkan pembinaan keagamaan melalui kegiatan tutorial bagi para mahasiswa; dan memindahkan mesjid Al-Furqon ke tempat yang lebih luas dan representatif sebagai mesjid kampus agar lebih maju, berkembang, dan modern.

Pengganti Prof.Drs.H. Muhammad Numan Somantri, M.Sc. sebagai Rektor IKIP Bandung pada tahun 1987 adalah Prof.Drs.H. Mas Abdul Kodir, M.Sc., lagi-lagi tokoh yang sebelumnya pernah menjabat sebagai PR I Bidang Akademik. Sebagaimana pendahulunya, Prof.Drs.H. Mas Abdul Kodir, M.Sc. adalah juga merupakan mahasiswa angkatan pertama PTPG Bandung tahun 1954. Di kalangan civitas akademika IKIP Bandung, Prof.Drs.H. Mas Abdul Kodir, M.Sc. sering dipandang

sebagai “akademisi karier”, dalam arti bahwa jabatan-jabatan akademik yang pernah dilaluinya benar-benar dimulai dari bawah: Ketua Jurusan, Pembantu Dekan I, Dekan, dan Pembantu Rektor I. Pada masa kepemimpinannya, IKIP Bandung berhasil menyelenggarakan KONASPI (Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia) yang pertama pada tahun 1988, sebuah tradisi akademik yang besar dan sampai sekarang masih terus dipertahankan dalam lingkup nasional. Sementara itu pengalaman karier dan pribadinya, menjadikan Prof.Drs.H. Mas Abdul Kodir, M.Sc. memandang perlu cara berpikir yang komprehensif dan kontekstual dalam kerangka untuk mengejar kemajuan. Dalam hal pengembangan kampus IKIP Bandung, misalnya, pada masa kepemimpinan Prof.Drs.H. Mas Abdul Kodir, M.Sc. inilah mulai dikenal apa yang disebut dengan “*master plan*”, sebuah rancangan pembangunan kampus yang sistematis, terarah, komprehensif, dan visioner melalui tahapan-tahapan kemajuan yang jelas ke masa depan.

Prof.Drs.H. Mas Abdul Kodir, M.Sc. mengakhiri jabatannya sebagai Rektor IKIP Bandung pada tahun 1995. Ia kemudian digantikan oleh tokoh yang pernah membantunya sebagai PR I Bidang Akademik, yakni Prof.Dr.H. Mohammad Fakry Gaffar, M.Ed.. Tokoh ini juga salah seorang putra terbaik almamaternya, karena ia adalah mahasiswa FKIP tahun 1962. Dan terpilihnya Prof.Dr.H. Mohammad Fakry Gaffar, M.Ed. sebagai pimpinan lembaga ini juga menarik karena dua hal. *Pertama*, beliau boleh dikatakan merupakan Rektor IKIP Bandung yang terakhir (1995-1999), yang menghantarkan lembaga ini berubah dari institut menjadi universitas dan beliau terpilih sebagai Rektor UPI di Bandung yang pertama (1999-2004). *Kedua*, memasuki era millenium III atau abad ke-21 lembaga ini menghadapi tantangan dan permasalahan yang tidak ringan, termasuk perubahan status UPI menjadi perguruan tinggi ber-BHMN, sehingga diperlukan figur kepemimpinan yang punya visi luas ke depan.

Dalam pemikiran Prof.Dr.H. Mohammad Fakry Gaffar, M.Ed., sebuah lembaga yang ingin tetap eksis, maju, berkembang, dan mampu bersaing di era globalisasi haruslah memiliki visi, misi, dan *policy* yang jelas dan berwawasan jauh

ke depan. Visi itu kemudian dijabarkan dan diimplementasikan ke dalam pilihan-pilihan strategi yang tepat dan mendasar, terutama dalam manajemen strategik kelembagaan agar mampu merespons dan fleksibel dalam menghadapi tantangan zaman. Memang, pada masa kepemimpinan Prof.Dr.H. Mohammad Fakry Gaffar, M.Ed. inilah IKIP Bandung dan UPI mampu melahirkan pemikiran-pemikiran yang responsif, inovatif, dan visioner ke depan untuk menjawab tantangan zaman seperti: (1) perlunya *wider mandate* untuk memperkokoh visi dan misi IKIP Bandung; (2) perlunya *cross vertilization* dalam pengembangan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu di UPI, sehingga menjadikan lembaga ini mampu berkembang dan bersaing di tingkat regional, nasional, dan global tanpa harus kehilangan identitas dan jatidirinya; dan (3) pengembangan UPI yang multi kampus, dengan sistem manajemen kelembagaan yang profesional untuk mengejar keunggulan kualitatif dan komparatif.

Pada waktu Prof.Dr.H. Mohammad Fakry Gaffar, M.Ed. menjabat sebagai Rektor IKIP Bandung beberapa peristiwa penting tercatat dalam sejarah lembaga ini. Tahun 1997 dan 1998 adalah periode kritis bagi bangsa Indonesia yang ditandai oleh merebaknya krisis ekonomi, yang berimplikasi pada krisis politik dan krisis kepercayaan kepada pemerintah Orde Baru. Sebagai lembaga yang tetap *concern* pada bidang pendidikan, IKIP Bandung kemudian mengajukan rekomendasi tentang pokok-pokok pemikiran reformasi pendidikan di Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1998, sivitas akademika IKIP Bandung berangkat ke Jakarta dan menyampaikan langsung tentang perlunya reformasi pendidikan di Indonesia itu kepada MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Pada saat itu suasananya sangat mencekam, dan gedung MPR sudah diduduki oleh para mahasiswa yang menghendaki adanya reformasi di negeri ini. Jika sejarah adalah sebuah proses yang kompleks dan banyak faktor kausalitasnya, barangkali boleh juga dikatakan bahwa IKIP Bandung merupakan salah satu unsur kekuatan dalam masyarakat Indonesia yang turut memberikan andil dalam perjuangan reformasi dan mempercepat proses keruntuhan pemerintah Orde Baru, sebab pada tanggal 21 Mei 1998

Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden RI.

Dalam pada itu, proses perubahan dari IKIP Bandung menjadi UPI pada tahun 1999 dan 2000 juga bukan masalah yang mudah. Sebagaimana diakui oleh Prof.Dr.H. Mohammad Fakry Gaffar, M.Ed. bahwa debat yang panas dan adu argumentasi yang kritis mewarnai sidang-sidang senat akademik di IKIP Bandung. Ketika perguruan-perguruan tinggi eks IKIP lain lebih bersemangat untuk menjadi universitas dengan visi dan misi yang belum jelas, serta memilih nama lembaga yang cenderung primordial dan sesuai dengan nama tempatnya, maka IKIP Bandung termasuk yang sadar akan proses perjalanan sejarahnya, bahwa ia haruslah merupakan lembaga pendidikan guru tingkat universitas dengan visi dan misi yang bisa diperluas, namun tetap harus bertaraf nasional. Maka disepakati dan lahirlah nama "*Universitas Pendidikan Indonesia*", sebuah pilihan kebijakan strategis yang cerdas dan tepat karena ternyata – dalam perkembangannya kemudian – banyak dipuji orang. Dan jika kewibawaan sebuah lembaga itu ditunjukkan, di antaranya, oleh pengakuan pimpinan negara dengan cara melakukan kunjungan kerjanya, maka sivitas akademika UPI dapat berbangga diri. Sebagaimana telah disinggung di muka, jika pada tahun 1957 Presiden Soekarno pernah berkunjung ke FKIP di Kampus Bumi Siliwangi, dan pada tahun 1974 Presiden Soeharto berkunjung ke kampus IKIP Bandung; maka pada tahun 2002 Presiden Megawati Soekarnoputri juga sempat berkunjung ke UPI. Kunjungan Presiden kali ini dalam rangka meresmikan penggunaan gedung JICA (*Japanese-Indonesian Cooperation Agency*) milik FPMIPA (Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) yang megah dan modern, serta merupakan kebanggaan bagi sivitas akademika UPI.

UPI di tahun 2004 – menapaki usianya yang setengah abad – tentu saja sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat. Jika pada masa awal berdirinya tahun 1954 lembaga ini hanya memiliki mahasiswa ratusan orang saja, dengan jumlah dosen dan karyawan yang juga terbatas; maka kini di tahun 2004 jumlah mahasiswa UPI lebih dari 25.000 orang,

dengan jumlah dosen dan karyawan masing-masing lebih dari 1.300 orang. Alumni UPI, sejak meluluskan sarjana muda tahun 1957 dan sarjana pendidikan tahun 1959 sampai dengan lulusan bulan Oktober 2004 sekarang telah mencapai lebih dari 100.000 orang. Mereka, para alumni UPI itu, tersebar di seluruh pelosok tanah air Indonesia, dengan tetap menekuni profesi kependidikan sebagai pilihan dan karier hidupnya, walaupun tidak jarang juga ada alumni yang berkiprah di bidang non kependidikan. Kampus UPI juga terus berkembang. UPI sekarang dikenal sebagai lembaga pendidikan dengan sistem multi kampus. Kampus UPI tersebar di Serang, Purwakarta, Cibiru, Sumedang, dan Tasikmalaya, dengan pusatnya tetap di kampus utama Bumi Siliwangi.

### **Penutup**

Memasuki tahun 2004, UPI juga mengalami fase penting dalam sejarahnya, yakni berubah status menjadi perguruan tinggi yang ber-BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Pilihan perubahan status ini juga bukan perkara yang mudah. Sebagaimana perubahan PTPG menjadi FKIP tahun 1957, penyatuan FKIP dengan IPG menjadi IKIP Bandung tahun 1963, dan perubahan IKIP Bandung menjadi UPI tahun 1999, maka perubahan UPI menjadi PT yang ber-BHMN tahun 2004 juga mengalami perdebatan yang seru dan pertentangan kepentingan yang tajam. Namun jika perspektif sosiologis dan analogi sejarah boleh digunakan, maka pertentangan dan konflik kepentingan itu hendaknya dimaknai sebagai medium dan katalisator bagi terciptanya dinamika perubahan, kemajuan, dan kohesi sosial.

Sebuah analogi yang bagus barangkali dapat dikemukakan di sini, yakni bahwa kapal yang bernama UPI dengan bendera BHMN-nya itu kini tengah berlayar mengarungi samudera luas untuk menuju pelabuhan yang dicita-citakan. Tentu saja dalam perjalannya itu akan menghadapi riak gelombang, batu karang, dan mungkin juga badai yang besar. Hanya nahkoda yang berkualitas unggul, terpercaya, dan punya visi jauh ke depan – tentu saja dengan dibekali oleh kompas perjalanan dan perangkat pelayaran lain, serta dibarengi oleh dukungan dan

optimisme awak kapalnya – maka Insya Allah pelabuhan yang dicita-citakan itu akan menjadi kenyataan. Karena itu, salah satu agenda penting bagi UPI ke depan adalah bagaimana bisa memilih dan menentukan pimpinan yang unggul, terpercaya, dan visioner agar lembaga ini – sebagaimana telah ditunjukkan oleh sejarahnya yang panjang – tetap eksis, maju, modern, dan berwibawa tidak hanya dalam lingkup regional dan nasional, tetapi juga dalam konteks persaingan global.

Akhirnya, jika saja tulisan ini mampu menggugah kesadaran, pemahaman, dan apresiasi civitas akademika UPI khususnya dan masyarakat umumnya terhadap sejarah sebuah lembaga yang penuh dengan dinamika namun tetap konsisten dalam pemikiran pendidikan – khususnya perjalanan lembaga UPI selama 50 tahun – maka sebagian besar dari tujuan saya menulis di *Pikiran Rakyat*, sebuah harian yang terkemuka di Jawa Barat saat ini, sudah mencapai sasaran. Semoga demikianlah adanya.

## Daftar Pustaka